



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT  
NOMOR **162** TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA  
BARAT NOMOR 618/HK.03.1/92/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN  
TUGAS / UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN PROVINSI PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 343/PW.01-SD/10/2022 Tanggal 29 Mei 2022 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2022;

2. Berita Acara Nomor : ~~307/HK.03.1/BA/22/2022~~ 307/HK.03.1/BA/22/2022 Rapat Pleno dalam rangka Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 618/HK.03.1/92/2021 Tentang Pembentukan Satuan Tugas/Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat..

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR NOMOR TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 618/HK.03.1/92/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS / UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT.

KESATU : Menetapkan Struktur / Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat.;

KEDUA : Struktur / Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 24 Mei 2022  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT

Ttd.

PASKALIS SEMUNYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT  
Kepala Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi  
dan Penyelenggaraan Masyarakat,  
Hukum dan SDM,



Joni Jitmau

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR  
NOMOR **162** TAHUN 2022 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA  
BARAT NOMOR 618/HK.03.1/92/2021  
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN  
TUGAS / UNIT PENGENDALIAN  
GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT

SATUAN TUGAS / UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2021

PENGARAH	:	KETUA KPU PROVINSI PAPUA BARAT
		ANGGOTA KPU PROVINSI PAPUA BARAT DIVISI SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN SUMBER DAYA MANUSIA
		ANGGGOTA KPU PROVINSI PAPUA BARAT DIVISI PERNCANAAN, DATA, DAN INFORMASI
		ANGGOTA KPU PROVINSI PAPUA BARAT DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN
		ANGGOTA KPU PROVINSI PAPUA BARAT DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN
KETUA	:	SEKRETARIS KPU PROVINSI PAPUA BARAT
SEKRETARIS	:	KEPALA BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT, HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA
ANGGOTA	:	KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM
		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
		KEPALA SUB BAGIAN DATA DAN INFORMASI

Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 24 Mei 2022  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT

Ttd.

PASKALIS SEMUNYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT  
Kepala Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi  
dan Penyelenggaraan Masyarakat,  
Hukum dan SDM,

